TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

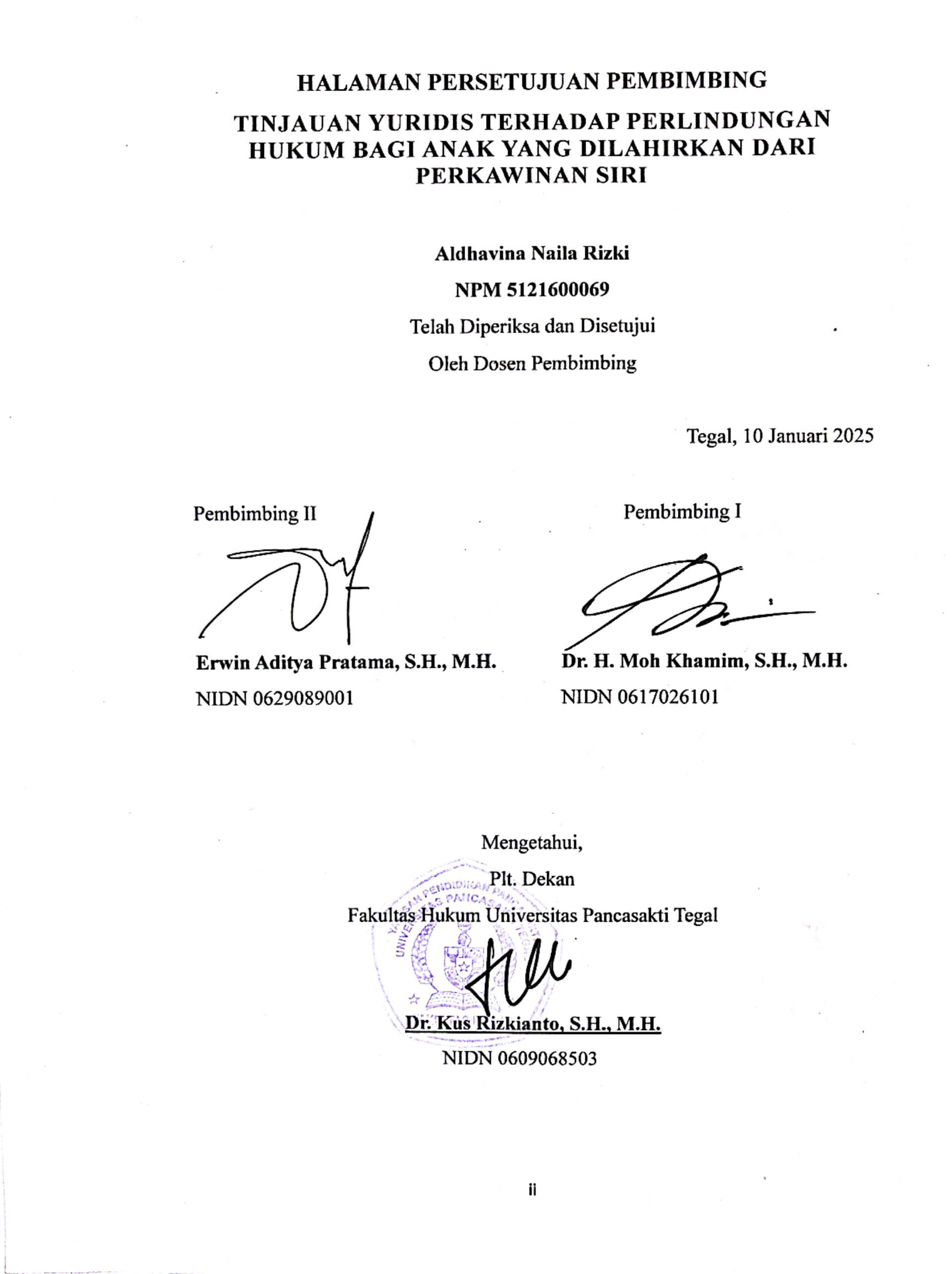
**Oleh: ALDHAVINA NAILA RIZKI**

## NPM 5121600069

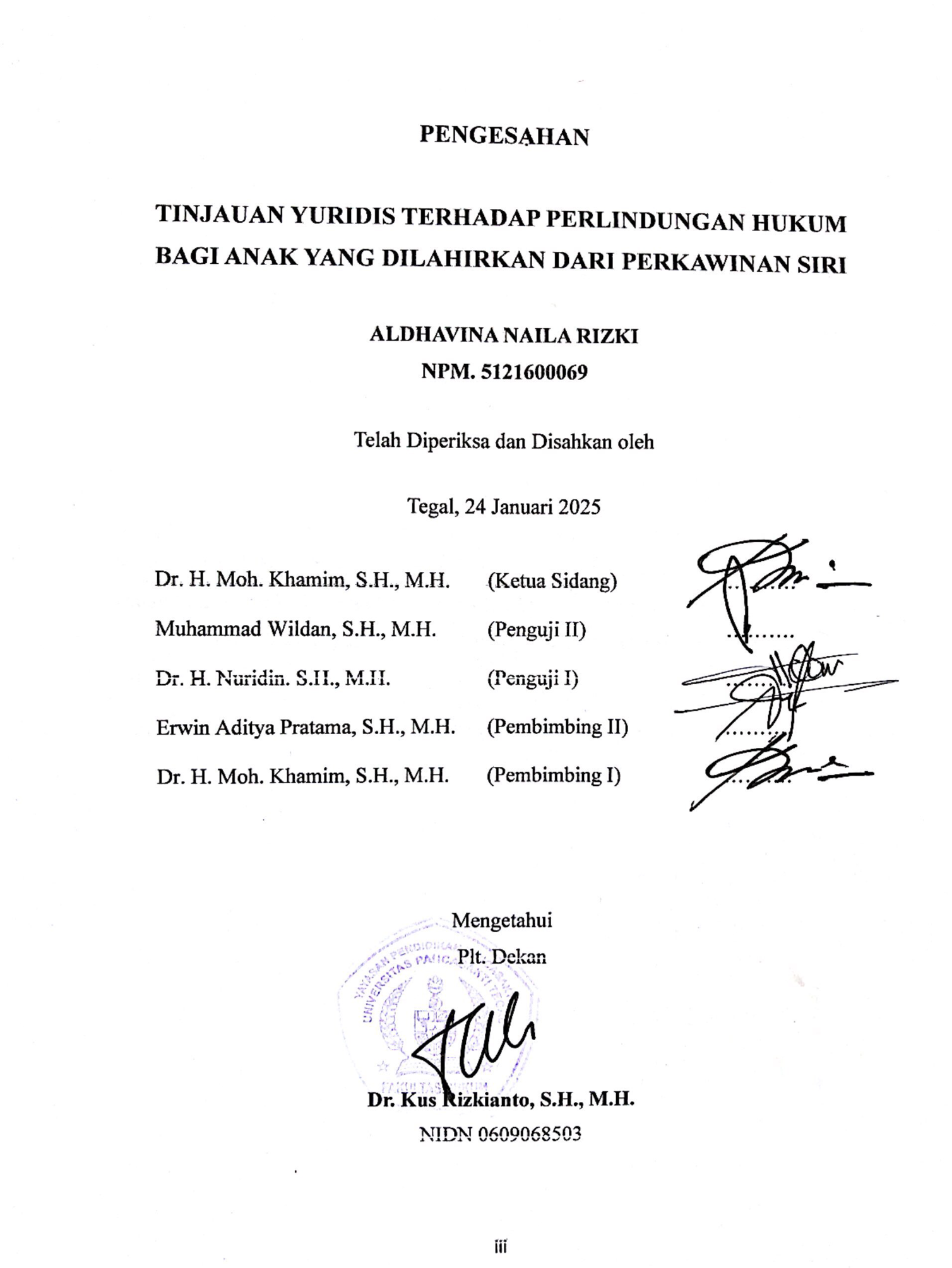
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

### 2025

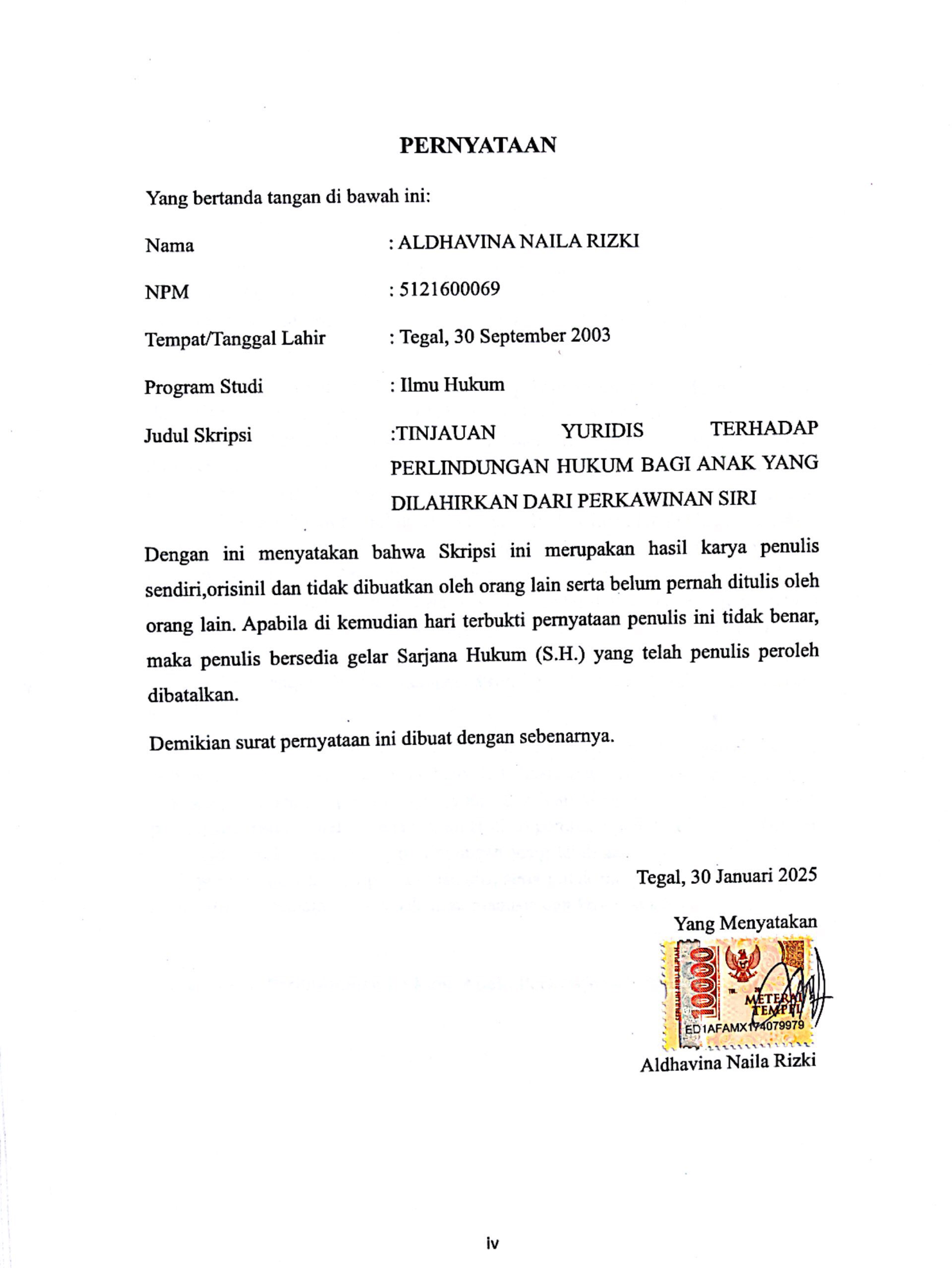
i



ii



iii



iv

## ABSTRAK

**Rizki, Aldhavina Naila**. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri*. Skripsi. Tegal; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2025

Perkawinan siri, yang merupakan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi menurut hukum negara, seringkali menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik dalam hal hak waris, hak pengakuan status, maupun hak-hak lainnya.

Penelitian ini bertujuan : (1) Menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. (2) Menganalisis perbedaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan terkait yang mengatur status anak dalam perkawinan siri. Anak dari perkawinan siri sering menghadapi kendala dalam hal pengakuan status hukum, hak waris, serta hak atas nafkah, karena tidak tercatat secara resmi dan tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan resmi memiliki status hukum yang jelas, diakui oleh negara, dan memperoleh perlindungan yang lebih lengkap sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri masih memiliki banyak kekurangan dan perbedaan signifikan dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan resmi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan setara bagi anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, serta untuk menjamin hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

### Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Siri

v

## *ABSTRACT*

**Rizki, Aldhavina Naila***. Juridical Review of Legal Protection for Children Born from Siri Marriages. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal, 2025.*

*Unregistered marriages, which are marriages that are not officially registered according to state law, often create uncertainty in the legal status of children born from such marriages, both in terms of inheritance rights, status recognition rights, and other rights.*

*This study aims to: (1) Analyze legal protection for children born from unregistered marriages. (2) Analyze the differences in legal protection for children born from unregistered marriages and children born from official marriages. This study uses a normative legal approach by analyzing relevant laws and regulations, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code (KUHPerdata), and related regulations governing the status of children in unregistered marriages. Children from unregistered marriages often face obstacles in terms of recognition of legal status, inheritance rights, and rights to support, because they are not officially registered and do not receive recognition from the state. Meanwhile, children born from official marriages have a clear legal status, are recognized by the state, and receive more complete protection in accordance with applicable laws and regulations.*

*This study concludes that legal protection for children born from unregistered marriages still has many shortcomings and significant differences compared to the protection given to children born from official marriages. Therefore, reform is needed in the Indonesian legal system to provide fairer and more equal protection for children born from unregistered marriages, as well as to guarantee their rights in accordance with the principles of human rights and social justice.*

***Keywords: Legal Protection, Children, Unregistered Marriage***

vi

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya tulis ini kupersembahkan kepada mereka yang selalu menjadi cahaya, kekuatan, dan inspirasi di setiap langkah perjalanan hidup penulis :

1. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, izinkan saya menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Bapak Edhy Purnomo dan Mamah Karniti. Pah terimakasih banyak sudah menjadi bapak yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, aku yang tidak pernah haus akan kasih sayang dari seorang bapak, bapak sudah purna tugas tapi bapak bisa menyekolahkan aku sampai menjadi sarjana. Mah, terimakasih atas segala dukungan, do’a dan kasih sayangnya mamah, terimakasih sudah banyak mengalah demi pendidikan anak’nya. Peran orang tua sangat berarti sekali untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do’a dan dukungan yang tiada hentinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini merupakan wujud kecil dari rasa hormat dan syukurku untuk kalian, yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih.
2. Ucapan terimakasih juga kepada semua keluarga penulis yang sudah memberikan dukungan, dan perhatian kepada penulis. Kepada kakak saya dan adik saya serta bude, pakde penulis yang tidak kalah pentingnya karena sudah selalu memberikan dukungan, kasih sayang untuk penulis.
3. Terimakasih kepada diri saya sendiri, Aldhavina Naila Rizki. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, tetap memilih berusaha sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terimakasih sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, ini merupakan pencapaian yang patut untuk dirayakan untuk diri sendiri.
4. Seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Farrel Adilfi Firmansyah, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan, semangat, tenaga.

vii

Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan hingga skripsi ini selesai. Terimakasih sudah berjuang bareng untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

1. Terima Kasih kepada sahabat saya dari sekolah SMP, (Elsa,Priska,Yani,Ca’i). Terima Kasih atas kebersamaan, dukungannya yang tak ternilai selama masa sekolah dan selama penulis menyusun skripsi ini. Terima Kasih sudah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita bisa jadi orang sukses.
2. Terima Kasih Kepada Amalia Salma Jauza, Fikah Nuryani, Rachel Nabila, Kania Alika Sharira. Terima Kasih sudah menjadi teman penulis dari semester awal hingga sekarang. Terima Kasih selalu mau untuk direpotkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima Kasih sudah saling mengingatkan dan menyemangati.
3. Terima Kasih kepada Pingka Fitria Adiningsih teman yang ketemu di KKN tetapi sekarang sudah menjadi teman dekat penulis, yang sudah menerima segala curhatan penulis, dan selalu mengajak ngopi di kopi kenangan. Semoga kita jadi orang sukses biar bisa ngopi tiap hari.
4. Terima Kasih kepada teman-teman kelas B Angkatan 21 yang sudah berjuang bersama dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga kita semua sukses dan terus berkembang dalam perjalanan hidup masing-masing.

viii

## MOTTO

“aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

“Skripsi yang sempurna adalah skripsi yang selesai, tidak perlu sempurna yang penting selesai”

ix

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini karena atas rahmat dan petunjuk-Nya lah yang penulis dapat mengerjakan serta mengikuti seluruh perkuliahan di Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Pancasakti Tegal. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan kendala, namun berkat kemudahan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa serta do’a, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati serta ucapan yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S,H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Erwin Aditya Pratama, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata I.

x

1. Segenap pegawai administrasi/ karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan dengan sabar.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 13 Februari 2025

### Aldhavina Naila Rizki

xi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_TOC_250035)

HALAMAN PENGESAHAN iii

[PERNYATAAN iv](#_TOC_250034)

[ABSTRAK v](#_TOC_250033)

[ABSTRACT vi](#_TOC_250032)

[PERSEMBAHAN vii](#_TOC_250031)

[MOTTO ix](#_TOC_250030)

[KATA PENGANTAR x](#_TOC_250029)

[DAFTAR ISI xii](#_TOC_250028)

[BAB I PENDAHULUAN](#_TOC_250027)

1. Latar Belakang 1
2. [Rumusan Masalah 8](#_TOC_250026)
3. [Tujuan Penelitian 8](#_TOC_250025)
4. [Urgensi Penelitian 8](#_TOC_250024)
5. [Tinjauan Pustaka 10](#_TOC_250023)
6. [Metode Penelitian 13](#_TOC_250022)
7. Sistematika Penulisan Laporan 18

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL](#_TOC_250021)

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 20
   1. [Perlindungan Hukum Terhadap Anak 20](#_TOC_250020)
   2. Dasar Hukum Perlindungan Anak 25
   3. Asas-Asas Perlindungan Hukum Anak 26
   4. [Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak 27](#_TOC_250019)
   5. [Peran Negara Dan Lembaga Dalam Perlindungan Hukum Anak 29](#_TOC_250018)
2. [Tinjauan Tentang Anak 31](#_TOC_250017)
   1. [Pengertian Anak Secara Umum 31](#_TOC_250016)
   2. [Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 32](#_TOC_250015)

xii

* 1. [Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin 33](#_TOC_250014)
  2. [Dasar Hukum Tentang Batas Umur Anak 36](#_TOC_250013)
  3. [Macam-Macam Anak 37](#_TOC_250012)

1. [Tinjauan Tentang Perkawinan 42](#_TOC_250011)
   1. [Pengertian Perkawinan Secara Umum 42](#_TOC_250010)
   2. [Syarat Perkawinan 44](#_TOC_250009)
   3. [Perjanjian Perkawinan 48](#_TOC_250008)
   4. [Dasar Hukum Perkawinan 50](#_TOC_250007)
   5. [Macam-Macam Perkawinan 51](#_TOC_250006)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. [Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Yang Berlaku 55](#_TOC_250005)
2. [Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri dengan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Resmi 67](#_TOC_250004)

[BAB IV PENUTUP](#_TOC_250003)

1. [Kesimpulan 80](#_TOC_250002)
2. [Saran 81](#_TOC_250001)

[Daftar Pustaka 83](#_TOC_250000)

xiii

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum mengakui perkawinan sebagai hak yang mendasar dalam konstitusi karena Negara mengakui hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan guna memelihara keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui perkawinan yang sah, untuk memelihara kehidupan seluruh umat manusia dan dapat bermanfaat bagi alam semesta. Oleh karena itu, pranata perkawinan diperlukan sebagai pintu yang menunjang keberadaannya, untuk memberikan aturan perkawinan yang dapat menentukan keharmonisan, keserasian antara apa yang dikandung hukum dengan apa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga aturan tersebut tidak hanya berupa teks teori saja, tetapi harus setuju dengan apa yang tertulis dan apa yang terjadi di masyarakat.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang nasional atau tidak dilangsungkan dengan khidmat oleh pejabat yang berwenang. Keberlangsungan perkawinan terkadang menjadi kebiasaan masyarakat, dengan alasan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan negara atau kesulitan dalam tata cara perkawinan yang ditetapkan negara atau ada yang mengatakan tidak mau sebab rumit. Namun satu hal yang pasti, ketika pernikahan siri terjadi, akan ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga Negara memasukkan masalah ini ke dalam sebuah aturan perundang-undangan perkawinan. Pernikahan siri

1

terkadang dipopulerkan dengan dalih penghindaran izin dan perilaku yang memalukan secara sosial[1](#_bookmark0).

Perkawinan dalam Islam disebut dengan istilah an-nikah. Nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menjadikan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri halal. Menurut ketentuan “Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sebaliknya ayat (2) menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar suatu perkawinan dianggap sah maka harus dilangsungkan berdasarkan agama serta harus didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang, hal ini dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut sah dan akta perkawinannya diakui di negara. Hal ini penting bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan harta benda yang ada dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum timbul dari perkawinan itu diakui dan mendapatkan kepastian hukum baik oleh undang-undang maupun oleh negara.

Salah satu tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Dimana di dalam

1 Lenny Nadriana, Elti Yunani, *“*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri*”, Jurnal Penelitian Hukum*, 2 (1), 2023 ; 28-35. https://bajagjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5931/4456

perkawinan siri dilaksanakan menurut peraturan agama atau tradisi serta tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinaan serta tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA)[2](#_bookmark1). Mencatatkan perkawinan kepada instansi yang berwenang adalah langkah penting dalam mendapatkan jaminan hukum dalam perkawinan, tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama lainnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan dasar hukum yang mengatur prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia. Ini memberikan kepastian hukum kepada pasangan yang menikah dan memberikan mereka kewenangan dan tanggung jawab yang disetujui oleh hukum.

Pencatatan perkawinan juga penting untuk perlindungan hukum perempuan. Perlu memastikan bahwa perempuan memiliki status hukum sebagai istri dan memiliki hak-hak yang diakui secara sah dalam perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan adalah persyaratan hukum, ini juga penting untuk memastikan bahwa perkawinan sesuai dengan keyakinan agama pasangan. Banyak agama memiliki upacara pernikahan khusus yang diakui oleh hukum sipil. Pencatatan perkawinan juga memiliki dampak sosial yang penting. Ini membantu dalam mengumpulkan data

2 Feronica Maria, *et al, “*Perlindungan Huukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri*”, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2 (8), 2023 ; 1171-1181 https://bajagjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5931/4456

statistik perkawinan, mengakses layanan pemerintah yang berkaitan dengan keluarga, dan melindungi hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan[3](#_bookmark2).

Contoh dalam sebuah kasus akan dilakukan sidang asal usul anak di Kota Madiun karena agar nama ayahnya bisa masuk ke akta lahir anak dari perkawinan siri. Hanya nama ibu yang tertera di akta kelahiran anak. Tidak disebutkan nama bapaknya biarpun secara biologis orang tersebut merupakan ayah kandungnya. Sebab, syarat penerbitan akta lahir merupakan buku nikah orang tua. Jika orang tuanya belum tercatat secara hukum sebagai suami-istri, akta anak tersebut akan tertulis anak dari ibu. Artinya, hanya ada nama ibunya dalam akta tersebut[4](#_bookmark3). ini menunjukkan bahwa praktik poligami tidak diakui secara sah dan ilegal, serta dokumen aslinya yaitu undang-undang perkawinan dan akta nikah tidak memenuhi tujuan yang dijanjikan. Untuk memperoleh akta ini, Harus mendaftarkan pernikahan di kantor agama tempat pernikahan akan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perlindungan anak berarti menjamin, mengayomi, dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan terlindungi

3 Achmad Thoric*,et al,* ”Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri Di Indonesia Menurut Ius Contitutum*”, Tebulreng Journal Of Islamic Studies And Society*, 2 (1), 2024 ; 26-51. https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/TJISS/article/download/6861/3289/15762

4 Hendra, “Agar Nama Ayah Bisa Masuk di Akta Lahir Anak dari Perkawinan Siri Pemkot Fasilitasi Sidang Asal Usul Anak”, *Madiuntoday,* Madiun, 20 Desember 2023, https://madiuntoday.id/berita/2023/12/20/agar-nama-ayah-bisa-masuk-di-akta-lahir-anak-dari- pernikahan-siri-pemkot-fasilitasi-sidang-asal-usul-anak, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, pukul 03.06 WIB

dari kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi manusia termasuk hak-hak anak, keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara harus mendukung, menjaga, dan menjamin hak-hak anak[5](#_bookmark4).

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknis, dan/atau alasan lain menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan. Bukti berdasarkan Undang-Undang dapat diterima sebagai hubungan darah, termasuk hubungan sipil, dengan keluarga ayah, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Undang- Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (*judicial review*) Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) selain Pasal 43 ayat (1) Seperti kasus yang di ajukan oleh Hj.Aisyah Mukhtar bin Ibrahim menyangkut penikahan sirinya dengan Alm. Moerdiono mantan Menteri era Soeharto hal ini di nyatakan dalam sebuah Keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggerang No. 46/Pdt.P/2008/PA.Tgr, perkawinan ini tidak dicatatkan karena Moerdiono pada saat itu masih terikat perkawinan dengan istrinya

5 Aris Supomo, *“*Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri*”, Jurnal Yustitia,* 3 (2), 2017 ; 170-184. https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/54

yang pertama yaitu Maryati[6](#_bookmark5). Banyak menuai kontroversi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dan menolak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Untuk menjamin kepastian hukum, pencatatan diperlukan. Akibatnya, perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan ini berlaku dan dilaksanakan menurut undang-undang lama adalah sah.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, dan apabila diartikan menghapuskan hubungan perdata, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dinyatakan bahwa tidak ada. Hubungan ayah dengan kerabat laki-laki yang berkerabat, berdasarkan temuan ilmiah dan bukti-bukti lainnya. Anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya serta hubungan perdata dengan ayah laki-laki yang dapat membuktikan adanya hubungan kekerabatan, termasuk hubungan keperdataan, berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan/atau bukti-bukti lain yang sah bersama ayahnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di kalangan ulama juga banyak pendapat masalah pernikahan di bawah tangan atau perkawinan siri ada yang

6 Panti Rahayu, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengakuan Anak Hasil Perkawinan Siri”, *Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum,* 1 (1) 2018 ; 135-140. https://journal.puskapkum.org/index.php/scripta/article/view/11

memperbolehkan dan ada juga yang tidak. Karena pentingnya pencatatan oleh negara pernikahan tanpa pencatatan akan banyak menimbulkan dampak dari segi hukum, maupun perlindungan negara kepadanya, baik itu kepada anak, hak waris anak dan istri tentu dapat merugikan para istri dan anak-anaknya, akan tetapi laki-laki yang melakukan pernikahan tersebut terkadang tidak mau tau tentang hal itu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, bermartabat dan terhormat, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi dalam memastikan hal itu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dan mengingat banyaknya permasalahan dan perselisihan yang timbul sehubungan dengan pewarisan terhadap anak hasil perkawinan tidak dicatatkan, maka kejelasan hukum hasil perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, khususnya akibat perkawinan tidak dicatatkan, maka sangat penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan. Melindungi agar anak-anak tersebut tidak didiskriminasi oleh berbagai pihak. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan, baik itu anak tiri, anak angkat, atau anak sah, tidak dicatat, sehingga hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi secara optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak hasil perkawinan siri menurut undang-undang yang berlaku, dengan judul skripsi **“Tinjauan**

### Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri”.

### Rumusan Masalah

* 1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil perkawinan siri menurut undang-undang yang berlaku?
  2. Bagaimana perbedaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan anak yang lahir dari perkawinan resmi?

### Tujuan Penelitian

* 1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil perkawinan siri menurut undang-undang
  2. Untuk menganalisis perbedaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan resmi

### Urgensi Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri yang dimana penting bagi Anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali menghadapi ketidakjelasan dalam status hukum dan hak hak mereka. Hal ini berpotensi menghalangi akses mereka terhadap hak-hak dasar, seperti hak waris dan pengakuan identitas. Banyak orang masih kurang memahami konsekuensi dari perkawinan siri, baik bagi orang tua maupun anak. Ada 3 Urgensi yaitu sebagai berikut :

* 1. Urgensi Teoritis

Penelitian ini untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum di Indonesia memperlakukan anak yang lahir dari perkawinan siri, baik dari sisi hak-hak pribadi seperti pengakuan status anak maupun hak-hak sosial seperti hak waris dan nafkah. Hal ini akan memperkaya teori hukum keluarga terkait dengan ketidakjelasan status hukum anak dalam situasi yang tidak diatur dengan jelas oleh hukum negara.

* 1. Urgensi Akademik

Penelitian ini relevan untuk memperluas kajian hukum keluarga dan hak anak dalam konteks perkawinan siri yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur mengenai perkawinan yang sah, namun pengaturan mengenai perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri belum secara jelas tercantum.

* 1. Urgensi Praktis

Memberikan kontribusi nyata terhadap praktik perlindungan hukum anak. Anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali mengalami ketidakjelasan dalam hal hak-hak mereka, termasuk hak atas pengakuan status anak, hak waris, dan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat dan praktisi hukum, termasuk pengacara dan hakim,

tentang bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut

### Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggali informasi dari beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa tinjauan pustaka yang penulis cantumkan, antara lain:

* 1. Skripsi Yeni Rahmawati (2023) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan”[7](#_bookmark6). Skripsi ini menjelaskan dampaknya sebagai akibat hukum anak hasil perkawinan dibawah tangan. Menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak hasil perkawinan di bawah tangan agar mereka mendapatkan hak-hak sipil yang layak.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan siri dan perlunya reformasi dalam sistem hukum agar hak- hak mereka dapat terlindungi secara lebih baik.

Kedua skripsi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang isu perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan tidak resmi, tetapi dengan fokus dan pendekatan yang berbeda.

7 Yeni Rahmawati, “Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Dibawah Tangan”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, 2023. [http://repository.unissula.ac.id/30332/2/30301900421\_fullpdf.](http://repository.unissula.ac.id/30332/2/30301900421_fullpdf)

* 1. Skripsi M.Ridho Julian (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”[8](#_bookmark7). Skripsi ini menyoroti bahwa anak-anak tersebut sering kali menghadapi masalah dalam hal pengakuan status hukum dan hak-hak mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Fokus utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak- hak anak yang lahir dari perkawinan siri, meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat secara sah menurut hukum negara. Penelitian ini lebih mengarah pada pengkajiannya terhadap peraturan yang sudah ada dan bagaimana implementasinya dalam melindungi anak-anak yang lahir dalam situasi tersebut.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis cenderung memberikan tinjauan yuridis yang lebih luas mengenai perlindungan hukum, mungkin dengan membahas aspek hukum yang terkait dengan anak-anak dari perkawinan siri, termasuk perbandingan dengan norma hukum atau pandangan dari berbagai undang-undang. Tinjauan ini bisa lebih luas, mencakup analisis berbagai aspek hukum terkait status anak dalam perkawinan siri, termasuk hak

8 M.Ridho Julian, “Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi Sarjana Hukum,Inderalaya:Perpustakaan Universitas Sriwijaya, 2022.

waris, status hukum anak, dan konsekuensi hukum lainnya yang timbul dari ketidakabsahan perkawinan menurut negara.

* 1. Skripsi Usama (2022) yang berjudul “Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Siri Sebab Masih Terikat Dengan Pria Lain”[9](#_bookmark8). Skripsi ini menegaskan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak hasil perkawinan siri, terutama dalam situasi di mana orang tua mereka masih terikat secara hukum dengan pasangan lain. Dan berharap bahwa temuan ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua anak di Indonesia. Perbedaan dengan peneliti kali ini adalah lebih umum dalam membahas perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tanpa menekankan pada situasi di mana orang tua masih terikat dengan pasangan lain. Fokusnya adalah pada aspek yuridis dan perlindungan hukum secara keseluruhan, termasuk hak-hak anak dan pengakuan status mereka di mata hukum.

Kedua skripsi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan siri, tetapi dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Usama lebih menekankan situasi spesifik yang kompleks akibat keterikatan orang tua

9 Usama, *“*Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Siri Sebab Masih Terikat Dengan Pria Lain”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2022 https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65658/1/USAMA%20-%20FSH.pdf

dengan pasangan lain, sedangkan skripsi tinjauan yuridis memberikan perspektif lebih luas tentang perlindungan hukum secara umum.

### Metode Penelitian

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).* Penelitian kepustakaan *(library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder[10](#_bookmark9). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang meneliti berbagai linteratur hukum, baik dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya. Studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi, data, dan perspektif yang telah ada sebelumnya, sehingga membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang relevan, mengidentifikasi, serta membandingkan hasil penelitian dengan karya-karya terdahulu. Selain itu, referensi yang valid dan terpercaya dari jurnal dan buku memberikan landasan ilmiah yang mendalam untuk analisis yuridis yang dilakukan dalam penelitian.

* 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan Hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku)[11](#_bookmark10). Terdapat beberapa cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian Hukum ini, yaitu:

10 Ahmad Irwan Hamzani, *et al*, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Kota Tegal : Fakultas Hukum UPS Tegal, 2024, hlm.3

11 *Ibid,* hlm.4

* + 1. *Statute Approch* (Pendekatan Perundang-Undangan) yang merupakan sumber Hukum Primer yang penulis kaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah dan mengkaji aturan hukum yang terkait dengan hak perlindungan anak. Merujuk pada berbagai Undang-Undang, antara lain :
       1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merupakan hukum dasar negara yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia.
       2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Putusan ini memiliki kedudukan sebagai produk hukum yang bersifat konstitutif dan mengikat, khususnya dalam menafsirkan konstitusi terkait status anak.
       3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini adalah peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan status anak dalam perkawinan yang sah.
       4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur

perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara sah.

* + - 1. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang ini mengatur perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara sah.
      2. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini mengatur tentang hak anak menurut perspektif hukum Islam, khususnya mengenai status anak yang lahir dari perkawinan siri.”
    1. *Case Studies* (Studi Kasus) penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.
  1. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data karena tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang sudah dikumpulkan kemudian disatukan dan dirancang guna menjawab permasalahan yang ada. Sumber data adalah subjek dari

mana asal data penelitian itu diperoleh[12](#_bookmark11). Pada penelitian ini menggunakan sumber data:

* + 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoratif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas)[13](#_bookmark12). Pada penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

* + - 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
      2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan
      3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
      4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      5. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
      6. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
    1. Bahan Hukum Sekunder

12 Sujarweni VW, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2014, hlm.32

13 David Tan*, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggaraan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (8), 2021 : 2472 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>

Bahan hukum sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

* + 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya adalah bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

* 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan studi kepustakaan, *Library research* dan peraturan perundang- undangan. Pustaka atau dokumen yang di teliti merupakan sumber hukum sekunder dan internet. Selanjutnya dilakukan menginvertasir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

* 1. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat menentukan data atau dokumen hukum apa yang mempunyai kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diperlukan untuk menentukan data atau dokumen hukum mana yang tidak sesuai dan tidak memilik korelasinya dengan materi penelitian ini.

Metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya menghubungkan hasil analisis dengan masalah penelitian tersebut sehingga tercipta evaluasi yang obyektif untuk menyelesaikan masalah penelitian tersebut[14](#_bookmark13). Studi yang berkaitan dengan aturan hukum yang ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

### Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing- masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini penulis akan memberikan pandangan awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian,tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

14 Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum,* dalam Devi Rahayu, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm.80

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**. Bab ini memuat penguraian secara umum tentang tinjauan konseptual yang berisi menganai tinjauan mengenai perlindungan hukum, tinjauan tentang anak, dan tinjauan tentang perkawinan.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini penulis

akan menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah secara kulitatif,dianalisis,dan ditafsirkan. Pada bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang terdiri atas Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Yang Berlaku dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri dan Perkawinan Resmi

**BAB IV PENUTUP**. Bab ini merupakan rangkuman semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Bab ini memuat Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi- asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran.

## BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

### Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan, bahwa anak harus selalu kita hargai karena mereka adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai harkat dan hak yang melekat sebagai manusia, serta wajib dilindungi. Hak asasi manusia termasuk hak anak, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak Anak. Dalam perspektif hidup berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah penerus bangsa dan generasi berikutnya akan meneruskan nilai-nilai bangsa[15](#_bookmark14). Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dibuat berdasarkan keyakinan bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa, terutama untuk meningkatkan kehidupan nasional dan internasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 sebagai berikut : Perlindungan Anak berarti segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi anak

15 Bambang Satriya, “Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis”, *Jurnal Konstitusi*, 8 (5), 2011 : 663-673. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/852/182

20

dari hak-haknya agar mereka dapat bertahan, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal. Anak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hidup sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, tumbuh, berkembang, dan terus beradaptasi secara optimal, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan untuk menjadi anak Indonesia yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak dan tugas orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk melindunginya, namun negara belum memiliki ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai dasar yuridis untuk pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum[16](#_bookmark15).

Hak anak adalah hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap anak sejak lahir ke dunia atau ketika masih dalam kandungan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dan

16 Dinar Mahardika, Erwin Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Prespektif Psikologi Hukum*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020, hlm 82-134. https://scholar.google.com/citations?view\_op=view\_citation&hl=id&user=eFKDpwQAAAAJ&pa gesize=80&citation\_for\_view=eFKDpwQAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

berlaku[17](#_bookmark16). Perlindungan anak mengacu pada segala upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua anak melaksanakan hak dan tanggung jawabnya atas perkembangan dan pertumbuhan alami sosial, mental dan fisiknya.

Perlindungan anak menciptakan keadilan dalam masyarakat, perlindungan anak diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi anak memiliki konsekuensi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis[18](#_bookmark17). Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk tindakan preventif atau penegakan hukum, sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan hukum[19](#_bookmark18).

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak mereka harus dilindungi dari menjadi korban tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang lain dan oleh lingkungan keluarganya sendiri, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga, tetapi pada kenyataanya masih banyak permasalahan tentang perlindungan anak. Deklarasi Hak Anak menjelaskan bahwa hendaknya anak menikmati seluruh haknya,

17 Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasaan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Dialektika Hukum,*

2 (1), 2020 ; 58-82. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika- hukum/article/view/510

18 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Bandung : Refika Aditama, 2008

19 Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung : Laduny Alifatma, 2021

dirinya dan keluarganya. Seluruh anak juga harus dilindungi dari segala tindakan diskriminasi berdasarkan agama, ras atau bentuk lainnya[20](#_bookmark19).

Aturan terkait perlindungan anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Dalam instrument HAM tersebut tidak ditemukan pemisah antara anak di luar kawin dengan anak sah dimana ini memperlihatkan bahwa semua anak memiliki hak terhadap perlakuan, perlindungan, jaminan, serta pengakuan hukum yang adil dam dapat memperoleh kesamaan perlakuan serta kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi tahun 2012 menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimana bahwa Undang-Undang Perkawinan berbunyi “anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya”. Terlihat jelas permasalahan untuk anak luar nikah, sebab anak-anak tidak dapat memperoleh berbagai hak ataupun status sebagai anak sah, sebab secara yuridis mereka hanya sebatas mempunyai hubungan kewarisan ataupun perdata dengan ibu serta keluarga dari ibunya, sebab ketidaksahan anak luar nikah tersebut, sebagai akibatnya, pria sebagai bapaknya tidak berkewajiban memberi hak kepada anak luar nikah. Sebaliknya anak itu pun tidak dapat

20 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung : Refika Aditama, 2012

mengajukan tuntutan pada bapak kandungnya supaya memenuhi haknya, sebab kedudukannya adalah anak tidak sah. Hak anak berdasarkan apa yang menjadi kewajiban bapaknya yang sebagai hubungan perdata tersebut, umumnya mempunyai sifat material.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), anak dibedakan menjadi tiga golongan :

1. Anak Sah, yaitu seorang anak tang lahir dalam suatu perkawinan.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi telah diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu.

Dalam hal ini, hanya orang yang mengakui anak itu yang memiliki ikatan antara mereka. Dengan demikian, keluarga orang yang mengakui anak itu tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak- anak dari hal ini dianggap sah jika ayah dan ibunya kawin lalu menjadi anak sah.

1. Anak yang lahir diluar perkawinan dan tidak diakui oleh ayah dan ibunya[21](#_bookmark20).

### Dasar Hukum Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia didasarkan pada beberapa sumber hukum yang mencakup konstitusi, undang- undang, peraturan pemerintah, serta norma internasional yang telah

21 Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.

diratifikasi oleh negara. Beberapa peraturan yang menjadi dasar perlindungan anak di Indonesia, di antaranya :

* + 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
    2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Undang-Undang ini mengatur secara spesifik hak-hak anak, serta berbagai bentuk perlindungan yang harus diberikan negara, keluarga, dan masyarakat terhadap anak-anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, Undang-Undang ini juga memberikan dasar perlindungan hukum bagi anak dengan penekanan pada pengaturan hak anak dan kewajiban negara serta orang tua dalam perlindungan anak[22](#_bookmark21).

Secara keseluruhan, dasar tujuan dari undang-undang perlindungan anak Indonesia adalah untuk mewujudkan kondisi yang aman dan mendukung hak-hak anak, serta memastikan mereka

22 Didi Nazmi, Syofirman Syofyan, “Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak”, *Journal Of Swara Justisia*, 7 (2), 2023 : 778-784. https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/380

terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam segala aspek kehidupan.

### Asas-Asas Perlindungan Anak

Penting untuk melindungi anak sejak lahir dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Konsep perlindungan anak yang komprehensif adalah dasar undang-undang ini, serta menetapkan kewajiban melindungi anak berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

* + 1. Non-diskriminasi

Perlindungan anak harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip utama konvensi hak anak.

* + 1. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Segala tindakan pemerintah, masyarakat, legislatif dan peradilan yang berdampak pada anak, kepentingan utama anak harus diperhatikan.

* + 1. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Hak asasi manusia yang paling penting bagi anak, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

* + 1. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip menghormati pendapat anak berarti menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

yang mempengaruhi kehidupannya dan untuk mengutarakan pendapatnya[23](#_bookmark22).

Asas-asas perlindungan anak ini adalah landasan untuk melindungi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan mereka. Perlindungan anak bukan tidak hanya kewajiban orang tua, tetapi juga kewajiban negara, masyarakat, serta semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan penuh hormat, kasih sayang, dan diberikan kesempatan untuk berkembang dengan optimal.

### Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan tanpa diskriminasi, serta dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Selain itu, tujuan perlindungan hukum adalah memastikan anak-anak memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap identitas mereka. Negara, melalui kebijakan hukum, juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk

23 Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2), 2011. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6245/5150

yang lahir dari perkawinan siri, memiliki akses terhadap hak-hak yang setara, seperti hak waris dan nafkah. Selain itu, perlindungan hukum bertujuan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil, baik oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Dengan demikian, tujuan perlindungan hukum ini adalah untuk menciptakan kondisi di mana Anak-anak dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang ideal tanpa adanya ancaman atau hambatan.

Tujuan perlindungan anak adalah memastikan bahwa semua anak di Indonesia mampu hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemanusiaan dan martabatnya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Seseorang memiliki kualitas, moralitas dan kesejahteraan. Kenyataannya, budaya eksploitasi anak masih ada di masyarakat Indonesia, antara lain: Eksploitasi anak sebagai pengemis, mempekerjakan anak, prostitusi, perdagangan manusia, dan digunakan sebagai alat untuk memaksakan kepentingan orang dewasa. Untuk menghasilkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, maka upaya konsep perlindungan anak yang integral, utuh, dan menyeluruh harus menjadi dasar dari upaya perlindungan anak yang dimulai sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun.

### Peran Negara Dan Lembaga Dalam Perlindungan Hukum Anak

Peran Negara dalam Perlindungan Hukum Anak :

* + 1. Pembentukan Perundang-Undangan : Negara memiliki kewajiban untuk merumuskan dan mengesahkan Undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak anak. Contoh aturan tersebut adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari bahaya. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau yang tidak dicatatkan. Dengan peraturan ini, negara memastikan adanya dasar hukum yang jelas bagi perlindungan hak anak.
    2. Penegakan Hukum: Negara melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Pengadilan bertugas untuk menegakkan hukum perlindungan anak. Ini termasuk menindak pelaku kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran terhadap anak. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak anak, seperti kekerasan atau penelantaran, diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan tujuan memberikan rasa aman bagi anak.
    3. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur: Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan anak, seperti fasilitas pendidikan, layanan

kesehatan, dan tempat perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan, seperti panti asuhan atau rumah aman. Negara memastikan bahwa fasilitas ini dapat diakses oleh semua anak, terutama yang berada dalam kondisi rentan atau terpinggirkan.

Peran Lembaga dalam Perlindungan Hukum Anak:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): KPAI memiliki peran utama dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan hukum terkait perlindungan anak di Indonesia. KPAI memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan anak, serta menangani aduan atau laporan pelanggaran hak anak. Mereka juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.
2. Polri dan Kejaksaan: Kepolisian dan Kejaksaan berperan dalam penanganan hukum atas kasus-kasus yang melibatkan anak, seperti kekerasan fisik, seksual, atau eksploitasi. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, menangkap pelaku, dan membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk proses hukum. Dalam hal ini, mereka memastikan proses hukum berjalan dengan cepat dan tepat agar anak korban mendapatkan keadilan.
3. Dinas Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA): Lembaga-lembaga ini berperan dalam memberikan bantuan sosial kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Dinas Sosial dan Kementerian

PPPA menyediakan layanan pemulihan psikologis, konseling, serta perlindungan sosial untuk anak-anak korban kekerasan. Mereka juga berfungsi untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga untuk menjaga dan melindungi anak-anak di lingkungan mereka.

Secara keseluruhan, peran negara dan lembaga terkait dalam perlindungan hukum anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari ancaman kekerasan dan eksploitasi serta dapat menikmati hak-hak mereka dengan aman.

### Tinjauan Tentang Anak

### Pengertian Anak Secara Umum

Umumnya anak merupakan makhluk hidup yang belum mencapai tahap dewasa. Dalam bidang psikologi, anak adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai tahap kematangan jasmani dan rohani, atau setidak-tidaknya belum mencapai masa pubertas. Berdasarkan klasifikasinya, anak-anak dibagi ke dalam kelompok umur mulai dari bayi hingga sekolah dasar bahkan remaja.

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya menurut Undang- Undang Perlindungan Anak, seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan dianggap anak. Ketika membahas arti kata “anak” dalam bahasa Indonesia, penting untuk memperhatikan aspek-aspek yang menyampaikan makna komprehensif

dan penting. Anak bukan hanya individu yang belum mencapai kedewasaan biologis, namun juga individu yang memiliki hak dan potensi yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Oleh karena itu, pengertian anak dalam bahasa Indonesia juga mencakup perlindungan hak-hak anak dan peningkatan kualitas hidupnya sebagai generasi penerus bangsa[24](#_bookmark23).

### Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia sendiri, ada beberapa definisi tentang anak, baik menurut aturan hukum maupun penilaian para ahli. Namun tidak terdapat persamaan antara pengertian anak, karena setiap pengertian didasarkan pada maksud dan tujuan masing-masing hukum dan profesi. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

* + 1. “Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
    2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.

24 Husnul Abdi, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli Undang-Undang,Dan Oerganisasi Internasional”, *Liputan6,* Jakarta, 24 Januari 2024, https[://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-](http://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-) dan-organisasi-internasional. diakses pada tanggal 17 November 2024, pukul 11.40 WIB

* + 1. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah orang yang belum berumur

18 tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan, jika itu demi kepentingannya

* + 1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “
    2. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
    3. Menurut Undang-Undang Nomor.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

### Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin

* + 1. Pengertian Anak Sah

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengatur Anak-anak hasil perkawinan tersebut adalah:

* + - 1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
      2. Hasil perbuatan suami dan istri diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Perkawinan adalah penyatuan lahir batin antara seorang laki- laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Kriteria perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing- masing. Semua perkawinan harus dicatat menurut hukum yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menekankan keabsahan perkawinan menurut hukum masing-masing agama, dan perlu dilakukan pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dasar dan syarat perkawinan agama Islam diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 KHI. Selain itu, kesepakatan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki harus membayar mahar kepada calon mempelai perempuan dalam jumlah, bentuk, dan cara yang ditetapkan. Kewajiban pencatatan perkawinan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hubungan hukum perdata yang timbul setelah perkawinan. Perkawinan menjadi sah dengan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki hak dan kewajiban hukum yang seutuhnya, termasuk hak dan kewajiban terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

* + 1. Pengertian Anak Luar Kawin

Sementara istilah "anak luar kawin" mengacu pada Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan dan tanpa perkawinan yang sah berhak mendapat jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ayah dan anggota keluargannya. Namun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas telah dinyatakan inkonstitusional dan bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Perlu di tekankan, Hubungan darah dengan ayah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sepanjang dimaknai mengecualikan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau pembuktian lain menurut undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas mengubah makna Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah dan/atau keluarga ayah, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang sah bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak haram tersebut. Sebaliknya, Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dapat dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya mengakuinya.

Pasal 272 KUHPerdata mengatur sebagai berikut: Anak luar nikah, selain anak hasil perzinahan atau noda darah, sah jika ayah dan ibu mengetahui secara sah mengenai anak tersebut sebelum perkawinan, atau melalui perkawinan berikutnya antara ayah dan ibu. Pengakuan dilakukan pada akta nikah itu sendiri. Selanjutnya Pasal 251 KUHPerdata menjelaskan sebagai berikut: Seorang suami dapat menolak mengawinkan anak yang lahir sebelum 180 hari setelah perkawinan. Namun, mungkin tidak dapat menolak dalam kasus berikut: Jika suami mengetahui kehamilannya sebelum menikah, Menyaksikan dikeluarkannya akta kelahiran, bila akta itu ditandatangani oleh orang itu atau memuat pernyataan oleh orang itu bahwa ia tidak sanggup menandatanganinya, bila anak itu dilahir mati. Kesimpulannya, anak luar kawin setidaknnya mempunyai dua pengertian. Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan adalah yang pertama. Yang kedua adalah anak yang tidak diakui oleh ayah atau

ibunya meskipun dilahirkan setelah perkawinan orang tuanya[25](#_bookmark24).

### Dasar Hukum Tentang Batas Umur Anak

Sebab dan akibat dari masing-masing peraturan hukum menentukan standar tersendiri mengenai anak, seperti yang terdapat pada pembahasan di bawah ini :

25Nafiatul Munawaroh, “Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin”, *Hukum Online*, 31 Mei 2024, https[://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-](http://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-) lt5e3beae140382/. diakses pada tanggal 17 November 2024, pukul 13.00 WIB

* + 1. Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan anak adalah seseorang yang telah berumur 18 tahun dan belum menikah.

* + 1. Anak Dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan 1948 mendefinisikan anak sebagai laki-laki atau perempuan yang belum berumur 14 tahun.

* + 1. Anak Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam tahun) tahun.

* + 1. Anak dalam pengertian KUHPerdata

Pasal 330 KUH Perdata (BW) mengatur bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah

* + 1. Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Pasal 42 Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah.

### Macam-Macam Anak

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain:

* + 1. Anak Sah

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, menurut hukum dianggap sebagai keturunan bapaknya. Sebaliknya, anak-anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah dikenal sebagai anak hasil zina atau anak luar perkawinan yang sah. Mereka hanya memiliki hubungan darah dengan ibu mereka dan tidak dapat dianggap sebagai anak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah adalah :

* + - 1. Anak yang lahir dari atau hasil perkawinan yang sah, dan
      2. Anak isteri yang lahir dari dan hasil pembuahan yang sah dari pasangan tersebut di luar kandungan.

Dari rumusan kedua pasal tersebut jelas bahwa undang- undang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah seorang anak dianggap dilahirkan di luar perkawinan. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dan yang kedua, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan.

* + 1. Anak Luar Kawin

Secara sederhana anak luar kawin ialah anak seorang wanita yang dilahirkan tidak mempunyai ikatan yang sah dari perkawinan lelaki yang sudah memberikan benih anak dalam kandungannya, sehingga tidak memiliki kedudukan hukumnya yang sempurna atas anak tersebut seperti anak sah pada umumnya. Anak luar kawin, ada tiga jenis :

* + - 1. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang tidak kawin, tetapi tidak dilarang kawin. Status anak ini sama dengan anak sah jika mereka (orangtuanya) kawin dan dapat diakui jika mereka tidak kawin (Pasal 272 KUHPerdata).
      2. Anak yang dilahirkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilarang kawin oleh hukum, atau salah satu atau kedua-duanya telah menikah dengan orang lain. Anak ini disebut "zina"[26](#_bookmark25).

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan antara hubungan dua orang yang tidak terikat perkawinan yang sah. Ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sebagai anak di luar kawin. Dalam hukum islam dan KUHPerdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin mempunyai beberapa ciri, antara lain:

1. Nasab mereka ada hubungannya dengan ibu mereka, bukan ayah kandung mereka.
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.
3. Anak luar kawin tidak termasuk dalam golongan anak yang berzina atau anak sumbang.

26 Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung : Nuansa Aulia, 2015.

1. Anak luar kawin yang diakui orangtuanya dapat mewarisi harta warisan orangtuanya.
2. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya tidak mempunyai hubungan hukum dengan mereka.
3. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sah.
   * 1. Anak Angkat

Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.

Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain: “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.

* + 1. Anak Sumbang / Anak Zina

Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan suami-istri yang tidak boleh menikah (seperti hubungan kakak-adik). Anak Zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan orang lain.

Ditetapkan pada pasal 289 KUHPerdata bahwa anak sumbang dan anak zina dapat mempunyai hubungan perdata serta nasab dengan ibu ataupun bapak kandungnya, walaupun anak tersebut memperoleh pengesahan meskipun hasil paksaan, namun tetap tidak mempunyai dampak hukumnya. Sebenarnya anak luar nikah dan anak sumbang tidak diakui sebagai anak sah, namun jika diperbandingkan antara Pasal 283 dengan Pasal 280 KUHPerdata, bisa diperoleh informasi bahwa anak sumbang dan anak zina dari kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan[27](#_bookmark26).

27 Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan,* Depok: Rajawali Pers, 2019, https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=21486

### Tinjauan Tentang Perkawinan

### Pengertian Perkawinan Secara Umum

Perkawinan merupakan hubungan tetap antara dua orang dan diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan, sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa seorang baik laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan yang sama untuk mengenal, mengamati, dan mencintai satu sama lain, serta perasaan yang sama untuk menikah. Berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Pernikahan memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada budaya setempat. Namun secara umum diakui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang eksklusif dan konsep perselingkuhan merupakan pelanggaran terhadap pernikahan. Pernikahan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memulai sebuah keluarga. Akta nikah adalah dokumen yang membuktikan ikatan perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan ini, maka jumlah populasi akan mengalami peningkatan, dan akan mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar.

Menurut Sayuti Thalib (1996) Perkawinan adalah ikatan suci yang sah untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan[28](#_bookmark27). sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasihi, tentram, dan juga bahagia. Hubungan perkawinan merupakan sebuah hubungan yang

28 Maimun, “Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Pedata”, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah,* 9 (1), 2022 ; 15-22.

https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/download/263/307/1271

di dalamnya terdapat suatu keterikatan berupa status perkawinan. Status perkawinan akan membentuk cara individu berfikir dan bertindak dalam perannya. Peran individu bukan hanya pada dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama.

Pengertian perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dapat didefinisikan bahwa perkawinan sebagai ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat diartikan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan batin, tetapi juga melibatkan ikatan batin suami istri. Selain itu tujuannya adalah untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Peraturan perundang-undangan ini juga menyinggung terkait legalitas dalam sebuah perkara yang ada dalam sebuah perkawinan.

Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa undang-undang hanya mempertimbangkan perkawinan dalam konteks hubungan perdata, menentukan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Pengertian perkawinan menurut KUHPerdata dapat diartikan bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum keperdataan. Dapat berarti bahwa hukum hanya melihat perkawinan sebagai suatu perjanjian atau kontrak antara 2 subjek yaitu

laki-laki dan perempuan, tanpa mempertimbangkan dari aspek agama atau moralitas.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap orang untuk memperbanyak dan menghasilkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Negara juga menjamin hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Ketentuan ini berperan penting dalam menjamin stabilitas dan kesejahteraan keluarga dan anak Indonesia.

### Syarat Perkawinan

Dalam suatu ikatan perkawinan, ada beberapa syarat terkait dengan dilangsungkannya sebuah proses perkawinan yang sah dari sudut pandang hukumnya yang berlaku di Indonesia. Beberapa syarat tersebut dibagi menjadi 2 lingkup, antara lain :

* + 1. Syarat Regulatif

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mendeskripsi syarat perkawinan sebagai berikut :

* + - 1. Usia minimum pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
      2. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
      3. Untuk usia seseorang, dalam rangka diberlangsungkannya perkawinan usia 21 tahun, harus dengan izin persetujuan dari orang tua / wali.
      4. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
      5. Pria hanya boleh menikah satu kali.
      6. Perkawinan tidak memiliki hubungan garis keturunan sedarah.

Menurut pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melarang perkawinan antara :

1. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus (misalnya, orangtua dengan anak)
2. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping (misalnya, saudara)
3. Memiliki hubungan semenda (misalnya, mertua dan menantu)
4. Memiliki hubungan sepersusuan (misalnya, anak susuan)
   * 1. Syarat Administrasi

Berikut syarat-syarat administrasi yang perlu dipenuhi :

* + - 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi calon mempelai dan orang tua.
      2. Surat pengantar nikah dari RT/RW setempat
      3. Dokumen N3 (Surat persetujuan mempelai)
      4. Dokumen N5 (Surat izin orangtua jika seseorang berusia 21 tahun)
      5. Foto coppy ijazah terakhir[29](#_bookmark28).

Sedangkan menurut TD Nugroho (2019) syarat perkawinan yang diperuntukan bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan adalah :

* + 1. Syarat Materil

Syarat ini merupakan syarat umum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini terbagi menjadi :

* + - 1. Syarat materil mutlak, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.
      2. Syarat materil relatif, yaitu mengenai ketentuan sumber daya ekonomi merupakan larangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.
    1. Syarat Formil

Syarat Formil Perkawinan merupakan persyaratan yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku. Syarat-syarat ini berkaitan dengan aspek administratif dan legal yang harus dipenuhi

29 Pemdesngareanakmaju, “Layanan Administrasi Pengantar Nikah Ke KUA”, *Ngareanak,*

Singorojo, 21 Oktober, 2019. <http://ngareanak.desa.id/kabardetail/KzJHeUdSMXFrejZSTXdYL3JiTFQ2Zz09/layanan-> administrasi-pengantar-nikah-ke-kua.html. diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 21.10 WIB

agar suatu perkawinan sah secara hukum. Di Indonesia, syarat formil ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Syarat ini terbagi dalam syarat- syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan sesuai kesepakatan[30](#_bookmark29).

Secara umum, tujuan perkawinan yang telah diuraikan menurut Dwi Julianti (2022) adalah :

* + - 1. Menyempurnakan agama
      2. Memiliki keturunan
      3. Mendapatkan kedamaian dan kenyamanan
      4. Menjaga dari perbuatan maksiat
      5. Menyempurnakan satu sama lain
      6. Menjalani kehidupan dengan seseorang untuk selamanya[31](#_bookmark30).

Meskipun tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, namun pernikahan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir di situ saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak

30 Lasmi Suandari, “Dampak Perkawinan Siri Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Dalam Lingkungan Pekerjaan Dan Keluarga”, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal : Perpustakaan Universitas Pancasakti Hukum, 2023

31 Dwi Julianti, “Tujuan Menikah”, *Rey Id*, 16 Desember 2022, https://rey.id/blog/gaya- hidup/keluarga/tujuan-menikah/ diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 22.40 WIB

dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga Kebahagiaan dan “keabadian” harus berdasarkan pada satu Tuhan, sebagaimana sila pertama Pancasila[32](#_bookmark31).

### Perjanjian Perkawinan

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan dan berdasarkan asas hukum yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan yang termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya lebih efektif dilaksanakan dengan tetap mengindahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[33](#_bookmark32).

32 Mohammad Nurul Huda, Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6 (2), 2022 : 42-48. https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970

33 Muhammad Sopiyan, “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Muhammadiah Jakarta,* 6 (2), 2023 : 179-

190. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/17973/8947

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian perkawinan telah diatur dalam satu pasal yaitu pasal 29 yang memiliki ketentuan, sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan harus dilaksanakan dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah
2. Perjanjian perkawinan dapat diadakan pada saat perkawinan atau sebelum perkawinan
3. Perjanjian tidak boleh melanggar batasan-batasan hukum, agama, dan norma kesusilaan
4. Selama perkawinan berlaku, perjanjian tidak bisa diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak
5. Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah pengesahan perkawinan, tetapi terhadap kedua pihak sejak saat perkawinan[34](#_bookmark33).

### Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan penting, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berikut dasar hukum perkawinan/pernikahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

34 Yudistiara Adipratama, “Perjanjian Perkawinan; Dasar Hukum, Fungsi, Materi Yang Diatur, dan Waktu Pembuatan”, *hukum online*, 31 Januari 2017, https://kcaselawyer.com/seputar- perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/ diakses pada tanggal 16 November 2024, pukul 14.33 WIB

* + 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B (1) yang mengatur hak seorang untuk melangsungkan perkawinan serta melanjutkan keturunannya. Bunyi pasal 28B

(1) tersebut adalah *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.*

* + 1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang- Undang ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan suami istri dan anak-anak dalam suatu perkawinan.
    2. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi cara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal

22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam dibidsng perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.

* + 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada 17 Februari 2012, merupakan langkah penting

dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia khususnya anak yang lahir diluar perkawinan.

* + 1. Putusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan[35](#_bookmark34).

### Macam-Macam Perkawinan

Ada beberapa bentuk perkawinan/pernikahan secara umum di Indonesia, antara lain :

* + 1. Pernikahan Resmi / sah

Perkawinan resmi adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mencakup pendaftaran dan pengesahan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan resmi adalah perkawinan yang tercatat dan diakui oleh negara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan resmi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, seperti adanya pencatatan di kantor pencatatan sipil atau lembaga agama yang berwenang,

35Ani Mardatila, “Tujuan Pernikahan”, *Merdeka.com,* https[://www.merdeka.com/sumut/tujuan-pernikahan-menurut-uu-no1-tahun-1974-ini-](http://www.merdeka.com/sumut/tujuan-pernikahan-menurut-uu-no1-tahun-1974-ini-) penjelasannya-kln.html, diakses pada tanggal 16 November 2024, pukul 20.40 WIB

tergantung pada agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan. Perkawinan resmi memberikan status hukum yang jelas bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak-hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya.

* + 1. Pernikahan Kontrak

Pernikahan kontrak dapat dikatakan sebagai nikah mut’ah merupakan bentuk pernikahan yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pernikahan ini merupakan bentuk lain dari perzinahan yang dilakukan tidak memenuhi aturan, baik dalam aturan pernikahan Agama maupun perundang-undangan.

* + 1. Pernikahan Siri

Pernikahan siri atau biasa dikenal sebagai perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun pernikahan ini sah dimata agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Perkawinan siri bertentangan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai

pencatat dengan tata cara pencatatan, yang dimana dalam perkawinan siri hal ini dihilangkan.

Pernikahan siri dikatakan sah secara agama Islam, apabila syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi dengan baik, para ulama telah merumuskan beberapa rukun dan persyaratan yang menjadikan pernikahan dapat dikatakan sah. Diantaranya ialah terdapat calon suami istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksanakannya ijab dan qabul akan tetapi tidak menghadirkan petugas pencatatan perkawinan dan tidak memiliki akta nikah[36](#_bookmark35).

* + 1. Pernikahan Gantung

Pernikahan gantung merupakan pernikahan yang sudah sah akan tetapi suami istri belum boleh tinggal serumah, atau perkawinan yang belum diresmikan penuh dan pengesahannya ditunda setelah kedua belah pihak mencapai usia dewasa. Karena pernikahan ini dilangsungkan saat pasangan masih sangat muda biasanya anak yang telah dijodohkan[37](#_bookmark36).

Secara keseluruhan, macam-macam perkawinan tersebut mencerminkan keberagaman dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia, baik dari segi agama, budaya, dan ketentuan hukum

36 Luluk Maslukhah, “Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri dan Anak”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, 2022 <http://repository.unissula.ac.id/27588/1/30501800036_fullpdf.pdf>

37Mochamad Januar Rizky, “Yuk Kenali Jenis Perkawinan Dalam Islam”, *Hukum Online,* Jakarta, 15 Juni 2018, https[://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-jenis-perkawinan-dalam-](http://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-jenis-perkawinan-dalam-) islam-lt5b1f8d75cfd62/?page=4, diakses pada tanggal 16 November 2024, pukul 21.30 WIB

yang berlaku. Setiap jenis perkawinan memiliki implikasi hukum yang berbeda, yang mempengaruhi hak-hak pasangan, anak, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami dan menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.